

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada umumnya seluruh entitas atau lembaga organisasi baik keuangan maupun non keuangan memiliki tujuan usahanya masing-masing. Biasanya tujuan perusahaan yaitu meraih laba yang besar serta mensejahterakan para anggotanya. Namun dalam mencapai tujuan tersebut pasti pernah mengalami yang namanya kesalahan. Dalam ilmu akuntansi, kesalahan di bagi menjadi 2 jenis yaitu kekeliruan dan kecurangan. Kekeliruan atau *error* mengandung unsure ketidaksengajaan sedangkan kecurangan atau *fraud* biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan atau suatu entitas. Namun tetap, misrepresentasi adalah demonstrasi palsu yang dilakukan sehingga menguntungkan diri sendiri, suatu perkumpulan atau perkumpulan yang berbeda. Kecurangan yang seperti itu dapat berpengaruh bagi perusahaan ataupun organisasi sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya. Namun jika dalam organisasi tersebut tidak terjadi tindak kecurangan ataupun penyelewengan maka perusahaan tersebut bisa dikatakan sehat dan mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Kasus kesalahan penyajian pembukuan di Indonesia sangat normal. Wawasan tentang kecurangan telah tersebar dalam berbagai komunikasi yang luas sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan kesalahan penyajian pembukuan pada saat ini tidak bersifat rahasia. Kegiatan yang sering terjadi dan kekotoran batin yang cepat adalah pengendalian arsip, penyalahgunaan aset dan masih ada tindakan lainnya. Kecurangan atau kerap dikenal dengan istilah *fraud* yang merupakan salah satu jenis penyesatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga

dapat menimbulkan kemalangan tanpa disadari oleh pihak yang tertindas dan memberikan keuntungan bagi pelaku pemerasan. Ada banyak ahli yang mencoba menggambarkan pentingnya curang, tetapi pada dasarnya itu memiliki arti yang sama.

Di Indonesia kecurangan sudah sangat mewabah dan berkembang dan sudah menjadi rahasia umum. Dalam IAI menguraikan bahwa penipuan akuntansi merupakan kesalahan yang muncul dari misrepresentasi dalam pengungkapan moneter dan kesalahan kutipan yang muncul dari penyalahgunaan atau penggelapan pada aktiva. Menurut survey *fraud* yang dilakukan oleh ACFE, Indonesia menduduki peringkat ke-2 di antara Negara-negara di ASEAN. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) merupakan suatu organisasi terhadap cheat untuk instruksi. ACFE menyusun misrepresentasi menjadi 3 klasifikasi, yaitu pemerasan sumber daya tertentu, penjelasan yang menyesatkan, dan penurunan nilai. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya pemerintah selalu berupaya untuk mengembangkan perekonomiannya. Di Bali ada lembaga keuangan mikro yang dikenal sebagai LPD (Lembaga Perkreditan Desa). LPD ini mengambil bagian dalam perbaikan moneter di kota Pakraman di Bali. Pengaturan kredit dapat membantu membuka pintu bisnis untuk warga desa..

Di Bali, kasus pungli semakin menjadi hal biasa. Oleh karena itu, salah satu lembaga keuangan yang berada di tingkat pedesaan yang juga tidak berdaya terhadap misrepresentasi adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD adalah unsur usaha keuangan yang dimiliki oleh setiap kota pakraman yang menyelesaikan kegiatan fungsionalnya di dalam iklim kota pakraman untuk melayani wilayah kota terdekat. LPD pertama kali dirintis oleh Gubernur

sebelumnya Ida Bagus Mantra yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian LPD di Provinsi Bali, sebagai upaya pemberdayaan peningkatan keuangan jaringan kota asli. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa adalah organisasi kota pakraman yang melakukan kemampuan keuangan desa pakraman untuk mengatasi kemampuan keuangan desa pakraman. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 juga dimaklumi bahwa LPD memberikan keuntungan finansial, sosial, dan sosial bagi jaringan negara. Diyakini dengan adanya LPD, daerah tidak akan pernah lagi menghadapi tantangan dalam mendapatkan cadangan.

Perkembangan LPD yang pesat tidak terlepas dari jika terjadi masalah di dalamnya dengan keadaan yang tidak sehat dan, yang mengherankan, LPD macet yang dapat menghambat pelaksanaan fungsional LPD. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi diantaranya kurang selektif dalam memberikan pinjaman kepada calon nasabah dan lemahnya pengendalian internal. Penyelewengan aset juga menjadi salah satu variabel yang membuat LPD tergolong buruk dan sial. Penyalahgunaan aset dapat disebabkan oleh administrasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tidak menguntungkan dan aset yang tidak langsung oleh dewan oleh LPD, menyebabkan beberapa demonstrasi palsu terjadi secara efektif dan kepercayaan publik juga berkurang. Beberapa variabel membuat LPD terpilah sebagai LPD yang malang dan macet, terutama karena pencurian aset atau perusakan dan penyelewengan sumber daya yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang di dalam LPD. Beberapa LPD di

Kabupaten Buleleng telah melakukan demonstrasi palsu. Informasi Kasus Fraud LPD di Kabupaten Buleleng Periode 2018-2020 terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Kecurangan LPD yang Terjadi di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2020

No	Kasus Kecurangan	Tahun	Keterangan
1	LPD Desa Bebetin	2018	Pada LPD Desa Bebetin terjadi kasus kecurangan yang melibatkan I Cening Wartana selaku Kepala LPD, tersangka di vonis 2 tahun penjara oleh pengadilan tipikor Denpasar karena telah terbukti melakukan tindak korupsi yang merugikan LPD Desa Adat Bebetin sebesar Rp 2,4 miliar. Ketua LPD meminta Kadek Rentiasih meloloskan beberapa kredit yang diajukan warga tanpa dilengkapi perizinan kemudian Ni Luh Swari (Kasir LPD) diminta mencairkan dana tersebut. (nusabali.com)
2	LPD Desa Bangkang	2018	Pada kasus ini Ketua LPD Desa Bangkang yang bernama I Gusti Ngurah Wibawa telah melakukan penggelapan dana nasabah yang diperkirakan mencapai Rp 807 Juta. Dalam kasus ini tersangka masih dalam pengejaran pihak kepolisian (DPO). (Baliexpress.jawapos.com)

3	LPD Desa Gerogak	2019	<p>Pada kasus yang terjadi di LPD Desa Gerogak, Komang Agus Putra Jaya selaku kepala LPD Desa Gerogak ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti telah melakukan tindak pidana berupa kredit fiktif nasabah yang dilakukan sejak tahun 2008-2015. Atas kecurangan tersebut tersangka diduga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1.246 miliar. (Balipost.com)</p>
4	LPD Desa Sangsit	2020	<p>Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa Sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama mencapai Rp 600 Juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum Pegawai LPD sebesar 25 Juta untuk di depositokan. Namun setelah dilakukan pengecekan, Bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat didalam transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit. (balitribune.co.id)</p>
5	LPD Desa Unggahan Seririt	2020	<p>Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana LPD yang muncul sekitar bulan agustus 2019 yang diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini Kejari Buleleng tengah melakukan pemeriksaan dan mendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana dengan memeriksa beberapa saksi seperti Pengurus adat yang lama, pengurus LPD yang</p>

			lama dan baru, pengawas LPD, Nasabah dan LPLPD Buleleng. (Nusabali.com)
--	--	--	---

(Sumber: data diolah, 2021)

Kecurangan akuntansi telah terjadi di berbagai sektor keuangan seperti halnya di lembaga perkreditan desa (LPD). Korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan dan posisi yang dipegang oleh otoritas atau pekerja untuk penambahan individu untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka, anggota keluarga dan teman. Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi, sangat mungkin terlihat bahwa banyak unsur yang terbukti menjadi penyebab kecenderungan terjadinya misrepresentasi antara lain posisi jabatan, ketidakrataan data, *inside control*, serta gaya kepemimpinan. Berdasarkan data kasus diatas kecurangan yang terjadi lebih banyak di kecamatan Sawan yaitu terjadi di desa Bebetin dan desa Sangsit. Selain itu kecurangan yang terjadi di desa Bebetin merupakan kasus kecurangan yang paling besar terjadi di antara desa lainnya. Nominal dana yang diselewengkan pula tidak sedikit yaitu 2,4 miliar rupiah merupakan nominal yang fantastis.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa ketua LPD yang ada di kecamatan Sawan yaitu diantaranya desa Bebetin, Menyali, dan Lemukih. Beberapa dari ketua tersebut memberikan pendapat mereka mengenai beberapa aspek mungkin mendampaki kecenderungan individu dalam bertindak kecurangan (*fraud*). Menurut Komang Mudiari selaku ketua LPD di desa Menyali, kecurangan atau *fraud* itu bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan jabatan. Beliau juga mengatakan dengan adanya jabatan yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap operasional, misalnya saja ada pegawai dengan jabatan yang lebih tinggi dari karyawan lainnya jika ada suatu peluang

untuk melakukan kecurangan maka akan mudah melakukan pemalsuan data atau informasi sehingga adanya ketidaksinkronan informasi. Jadi disimpulkan bahwa orang akan melakukan hal yang sewenang-wenang dengan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan jika menurut ketua LPD desa Bebetin I Made Soma Artana mengatakan bahwa seorang oknum akan sangat mudah melakukan jika adanya peluang seperti oknum yang memiliki posisi jabatan yang tinggi. Namun selain peluang ada pula yang menyebabkan kecenderungan dilakukannya kecurangan yaitu kurangnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Selain itu juga kecenderungan kecurangan bisa di pengaruhi oleh bagaimana seorang pemimpin memberikan arahan untuk memimpin bawahannya. Jika seorang karyawan tidak suka dengan bagaimana cara atasannya memimpin, maka itu bisa pula sebagai faktor penyebab seseorang hendak melakukan kecurangan. Nengah Ariaman selaku ketua LPD desa Lemukih juga mengutarakan pendapatnya terkait dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*). Beliau mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan kecurangan itu pasti karena ada tekanan baik itu dari dalam organisasi atau dari luar seperti tekanan keluarga dan ekonomi. Dikatakan pula kecurangan juga akan dengan mudah dilakukan jika ada yang namanya suatu peluang atau kesempatan. Selain itu ada pula aspek yang mendampaki kecondongan seseorang melakukan kecurangan yakni adanya ketidakpuasan baik itu terhadap pekerjaannya maupun pesangonnya.

Kecurangan dapat dilakukan oleh individu dari dalam atau luar LPD untuk memperoleh keuntungan sendiri dan merusak perkumpulan yang berbeda. Bagaimanapun, biasanya pelaku misrepresentasi adalah perwakilan atau orang-orang yang bekerja di LPD. Mengingat hipotesis segitiga misrepresentasi, variabel

yang memengaruhi kecenderungan atau bahaya pemerasan mencakup ketegangan, peluang, dan pembenaran. Tekanan adalah inspirasi pekerja untuk melakukan misrepresentasi karena ketegangan, baik moneter maupun non-moneter, ketegangan dari individu dan otoritas seperti kepemimpinan dan tugas yang berlebihan. Tekanan dapat mencakup semuanya termasuk permintaan uang, gaya hidup, dll. Dalam penelitian mengenai *fraud* ini memproksikan posisi jabatan, asimetri informasi, dan pengendalian internal sebagai sebuah peluang atau *opportunity* sedangkan untuk gaya kepemimpinan di proksikan sebagai suatu tekanan atau *pressure*.

Jabatan adalah posisi yang dipegang oleh seseorang yang memiliki wewenang yang memadai sehingga mudah baginya untuk menentukan pilihan tanpa mempedulikan dukungan bawahannya. Demikian pula tempat berkantor merupakan hak formal dan sah untuk memberikan tenaga ahli dalam memutuskan, memberikan permintaan, dan menetapkan harta kekayaan yang akan dicapai. Dalam beberapa kasus, posisi yang dipegang digunakan secara gegabah untuk mendapatkan keuntungan individu. Seorang individu di suatu tempat kantor memiliki dampak yang lebih besar atas keadaan tertentu. Jadi semakin tinggi jabatan yang diperoleh, semakin menonjol pula kecenderungan terjadinya pemerasan. Dalam penelitian Iphani (2017) disebutkan pula bahwa penyalahgunaan aset berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuatan dan dampak dari posisi unik guna kepentingan sendiri.

Selain dengan posisi jabatan, adanya ketimpangan informasi juga mengindikasikan adanya kecurangan. Merujuk *Agency theory* yang menyatakan bahwa dalam persekutuan terdapat hubungan yang mengikat secara hukum antara

pemilik (kepala) dan pengawas (spesialis). Kepala (spesialis) adalah individu yang dipilih oleh kepala untuk melakukan gerakan sesuai keinginan kepala. Bagaimanapun, dalam hubungan ini kemudian muncul masalah, khususnya perbedaan keinginan dan tujuan antara kepala dan spesialis. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ketidakrataannya data, yang memicu bentrokan (Mujianingrum, 2019). Adanya ketidakrataannya data membuat masing-masing pihak berusaha mengeksploitasi pihak lain untuk keuntungannya sendiri. Karena jika terjadi ketidakrataannya data di antara keduanya, justru akan mempengaruhi rekapitulasi anggaran yang bisa memicu pungli. Pemalsuan yang terjadi mulai dari kesalahan laporan fiskal dan penyimpangan dari sumber daya untuk kemerosotan.

Mencegah tindakan kecurangan (*fraud*), suatu badan usaha, instansi maupun asosiasi harus memiliki kekuatan yang serius untuk memiliki kontrol. Kontrol interior dicirikan sebagai siklus yang dipengaruhi oleh SDM dan kerangka kerja inovasi data, yang dimaksudkan untuk membantu asosiasi dalam mencapai tujuannya. Kontrol batin adalah metode untuk mengoordinasikan, menyaring, dan mengukur aset hierarkis. Juga, itu mengasumsikan bagian penting dalam mencegah dan mengenali representasi yang keliru (*fraud*) (Mujianinrum, 2019). Dalam penelitian Biani & Lufti (2018) menyebtkan semakin rendah tingkat kontrol interior, semakin tinggi kemungkinan untuk melakukan kesalahan penyajian pembukuan. Sebaliknya, dengan asumsi tingkat pengendalian orang dalam di dalam elemen atau asosiasi dapat berjalan dengan baik, kecenderungan untuk melakukan pemerasan pembukuan lebih rendah sehingga interaksi pengumuman moneter berikutnya dapat memberikan data yang signifikan.

Selain pengendalian internal ada pula aspek lain yang mendampaki kecenderungan dilakukannya suatu kecurangan atau *fraud* yakni gaya kepemimpinan. Berdasarkan hasil wawancara awal bersama Nengah Ariaman selaku ketua LPD desa Lemukih juga mengutarakan pendapatnya terkait dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), beliau juga menyatakan bahwa kepemimpinan juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pengendalian interior organisasi memainkan peran penting. Dari segi kewenangan itu sendiri, corak atau cara cikal bakal dalam menjalankan suatu organisasi merupakan unsur yang mempengaruhi jalannya latihan dalam organisasi atau perkumpulan tersebut. Gaya otoritas yang diterapkan mulai dari satu organisasi kemudian ke organisasi berikutnya sebenarnya tidak sama, karena bergantung pada banyak hal, salah satunya adalah mengandalkan pionir itu sendiri. Gaya administrasi dalam organisasi serupa sebenarnya bisa berubah jika pelopor dalam organisasi itu juga berubah. Gaya otoritas adalah cara di mana perintis menerapkan dampak pada pekerja atau bawahannya untuk berusaha lebih baik dalam mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, gaya seorang cikal bakal dalam menggerakkan wakil-wakilnya sangat penting dalam sebuah organisasi (Heriyanti, 2007). Oleh karena itu dampak perintis pada perwakilan juga mempengaruhi tempat kerja di dalam organisasi. Efek ekologis dapat sejauh moral yang berlaku di dalam organisasi untuk pameran perwakilan terhadap pekerjaan dan kewajiban mereka di dalam suatu organisasi. Kewajiban seorang pionir juga berkaitan dengan budaya hierarkis yang telah dimiliki oleh organisasi yang juga terkait dengan moral yang ditumbuhkan di dalam organisasi. Sesuai COSO (2004) dalam Pramudita (2013) dikatakan bahwa iklim moral suatu

asosiasi menggabungkan bagian dari gaya administrasi puncak dalam mencapai tujuan hierarkis, kualitas mereka dan dewan atau gaya administrasi, dikatakan bahwa dalam lebih moral iklim, pekerja umumnya akan mengikuti pedoman organisasi dan pedoman ini akan menjadi cara berperilaku yang baik secara etis sehingga orang dapat mengatakan bahwa dalam iklim moral yang dibingkai oleh gaya inisiatif yang layak, itu akan mempengaruhi kecenderungan pemerasan representatif. Maka untuk membingkai iklim moral yang jauh dari perbuatan curang, diperlukan sosok perintis yang baik menurut perwakilan, seorang pekerja yang memiliki pandangan buruk terhadap gaya inisiatif pimpinannya, maka pada saat itu, perwakilan akan lebih sering daripada tidak menyebabkan hal-hal yang akan merusak organisasi, untuk situasi ini melakukan misrepresentasi.

Riset Budiartini (2019) memperlihatkan posisi jabatan memiliki dampak signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) serta kelangsungan pengendalian batin, penerapan pedoman, dan kepatutan remunerasi, dan budaya hierarkis mempengaruhi kecenderungan misrepresentasi. Namun masih sangat terbatas referensi mengenai penelitian dengan variabel posisi jabatan. Sedangkan untuk penelitian terkait kecenderungan kecurangan dari Gayatri (2017) memperlihatkan ketidakrataan data sangat berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya misrepresentasi, dan terdapat dampak negatif dan masif antara inside control framework dengan kecenderungan terjadinya pungli. Sejalan dengan riset Biani Naeli Muna dan Lutfi Harris (2018) dan Gayatri (2017), yang mana dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa Ketidakseimbangan data secara tegas mempengaruhi kecenderungan pungli pembukuan. Sedangkan dalam riset Arifianto (2017) didalam riset ini dijabarkan hasil riset Gusmaini dkk pada tahun

2014 yang mana Ketidakrataan data secara signifikan mempengaruhi kecenderungan kecurangan penyajian pembukuan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penangkalan kesalahan penyajian pembukuan dilakukan oleh Lubis (2016) yang menunjukkan bahwa dilihat dari konsekuensi penanganan, diketahui bahwa dampak dari pemerasan pembukuan pengendalian interior, pergantian peristiwa kualitas pekerja, dan gaya otoritas mempengaruhi antisipasi kesalahan penyajian pembukuan. Agaknya, pengendalian interior di bidang pembukuan dan peningkatan kualitas pekerja, berpengaruh terhadap penanggulangan pungli pembukuan. Sementara itu, variabel gaya otoritas jelas mempengaruhi penghindaran kesalahan penyajian pembukuan, namun tidak terlalu besar. Bagaimanapun, penelitian yang dipimpin oleh Biani Naeli Muna dan Lufti Harris (2018) memahami bahwa pengendalian orang dalam berdampak buruk terhadap kecenderungan salah saji pembukuan. Demikian pula, penelitian yang dipimpin oleh Sumbayak (2017) yang memaknai gaya inisiatif itu berdampak buruk pada kecenderungan misrepresentasi pembukuan.

Beberapa penelitian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kecenderungan misrepresentasi (pemerasan) telah diselesaikan. Investigasi yang berbeda ini belum memiliki hasil yang stabil dan masih banyak referensi yang tidak ada. Efek samping dari investigasi ini memiliki tujuan yang saling bertentangan sehingga menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Bagian kontras antara eksplorasi ini dan pemeriksaan masa lalu terletak pada: 1) pemabahan variabel independen yaitu posisi jabatan; 2) adanya kompilasi antara variabel-variabel independen dari beberapa penelitian sebelumnya; 3) serta letak objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni menggunakan LPD

yang ada di Kecamatan Sawan terkait dengan kecenderungan kecurangan. Mengingat ketidakteraturan efek samping dari pemeriksaan yang diarahkan oleh para analis yang berbeda ini serta aspek pendukung lainnya maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali serta dengan menambahkan beberapa variabel baru dalam penelitian ini agar mengetahui apakah posisi jabatan, asimetri informasi, pengendalian internal, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Posisi Jabatan, Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Studi pada lembaga perkreditan desa (LPD) sekecamatan Sawan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar balik permasalahan diatas, hingga bisa diidentifikasi kasus dalam riset ini merupakan:

1. Kasus kecurangan saat ini seringkali terjadi di berbagai bidang, khususnya terdapat beberapa kecurangan yang berlangsung pada LPD. Kasus beberapa waktu lalu menjadi *trending* di masyarakat yang sangat menghebohkan yaitu penggelapan dana atau korupsi dengan jumlah yang sangat besar sehingga menyebabkan pihak LPD hampir mengalami kemacetan parah.
2. Banyaknya oknum-oknum yang memiliki posisi jabatan yang tinggi yang melakukan tindakan kecurangan.
3. Sistem pengendalian internal yang lemah menimbulkan transaksi- transaksi yang dicoba oleh pengelola peninggalan di bagian keuangan serta akuntansi

masih rawan sehingga bisa memunculkan peluang buat melaksanakan kecurangan.

4. Banyaknya tindak kecurangan ini juga didukung dengan adanya asimetri informasi yang terselubung di dalamnya serta gaya kepemimpinan yang dianutnya.

1.3. Batasan Masalah

Terdapatnya pembatasan permasalahan ini merupakan bertujuan guna menghalangi lingkup riset supaya lebih fokus serta mendalam pada permasalahan yang hendak diteliti serta bisa menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Cakupan batas permasalahan dalam riset ini ialah selaku berikut:

1. Objek penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sekecamatan Sawan.
2. Penelitian menggunakan variabel dependen kecurangan (*fraud*).
3. Variabel independen yang meliputi posisi jabatan, asimetri informasi, pengendalian internal, dan gaya kepemimpinan.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan-permasalahan mengenai posisi jabatan, adanya asimetri informasi, bagaimana pengendalian internal suatu organisasi, serta bagaimana gaya kepemimpinan yang dianutnya dalam menjalankan suatu organisasi. Karena dewasa ini banyak sekali kasus kecurangan atau *fraud* yang terjadi di lembaga keuangan atau organisasi lainnya tidak terlepas LPD. Kecurangan sendiri bisa saja terjadi karena adanya faktor dari dalam

maupun dari luar semasa itu ada kesempatan. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh posisi jabatan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
2. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh posisi jabatan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Jurusan atau Program Studi

Akibat dari riset ini diperlukan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya perihal seberapa besar efek faktor posisi jabatan,

asimetri informasi, pengendalian internal serta gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Akademisi

diperlukan penelitian ini bisa menambah pembendaharaan perpustakaan sebagai akibatnya bisa menjadi acuan mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang faktor posisi jabatan, asimetri informasi, pengendalian internal serta gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dan menjadi tambahan pengetahuan pada bidang akuntansi.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan dan pengetahuan tentang apa saja yang dapat memicu adanya kecenderungan kecurangan agar dapat meminimalisirnya serta dijadikan evaluasi kedepannya agar tidak terjadi lagi tindak kecurangan nantinya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam suatu organisasi.

